

**LAPORAN  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
(LKjIP) TAHUN 2022**



**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN**

## KATA PENGANTAR

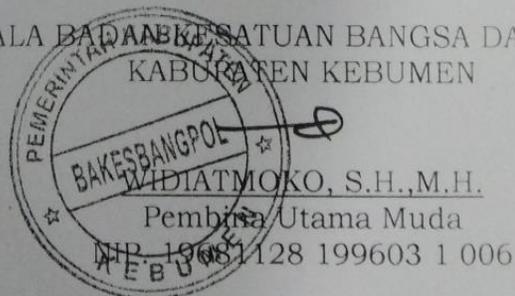
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah dan rahmat-Nya kepada kita semua, sehingga kami dapat menyusun LKjIP ( Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dan ini sebagai tindak lanjut pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026.

Penyusunan LKjIP ini sebagai implementasi dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Publik Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah. Secara substantif Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Badan Kesatuan Bangsa Politik Kabupaten Kebumen ini merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan secara baik dan benar.

Selain itu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 merupakan evaluasi terhadap berbagai program kerja pada Tahun 2022, sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi, dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kebumen, 5 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN



## DAFTAR ISI

COVER	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR DIAGRAM	v
BAB I	: PENDAHULUAN
1.1	Gambaran Umum Organisasi ..... 1
1.2	Fungsi Strategis.. ..... 5
1.3	Permasalahan Utama yang Dihadapi .... 7
1.4	Sistematika Penyusunan LKjIP..... 8
BAB II	: PERENCANAAN KINERJA
2.1	Perencanaan Strategis ..... 10
2.2	Rencana Strategis ..... 11
2.3.	Indikator Kinerja Utama ..... 11
BAB III	: AKUNTABILITAS KINERJA
A.	Capaian Kinerja Organisasi ..... 12
B.	Realisasi Anggaran..... 18
BAB IV	: PENUTUP ..... 22

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen .....	12
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah .....	13
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen .....	14
Tabel 3.3	Analisis Efisiensi Sumber Daya .....	16
Tabel 3.4	Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan .....	19

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Susunan Organisasi dan Tatalaksana Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten ..... Kebumen	3
------------	--	---

## DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Jumlah pegawai menurut eselon/ jabatan.....	4
Diagram 1.2. Jumlah pegawai menurut golongan.....	4
Diagram 1.3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan.....	4

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Gambaran Umum Organisasi

Sejalan dengan perkembangan reformasi birokrasi, setiap unit institusi pemerintah sebagai organisasi publik harus lebih terbuka dan transparan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) sebagaimana dalam Permenpan dan RB Nomor 88 Tahun 2021 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Setiap SKPD diharapkan dapat membuat rencana strategis (*Strategic Plan*), Rencana Kinerja (*Performance Plan*) serta Laporan Pertanggungjawaban Kinerja (*Performance Accountability Report*) organisasi yang mencerminkan transparansi dan akuntabilitas organisasi. Rencana Kinerja (*Performance Accountability Report*) merupakan uraian lebih lanjut secara periodik dari rencana strategis. Rencana strategis merupakan rencana umum setiap lima tahunan yang harus diuraikan lebih lanjut ke dalam rencana tahunan agar program dan kegiatan dapat terfokus. Rencana kinerja yang telah tersusun diharapkan menghasilkan kinerja organisasi berjalan dengan baik.

Penyelenggaraan pembangunan suatu pemerintahan yang baik harus dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dan dapat mencapai tujuan serta cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk dapat mewujudkan itu semua diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas

dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

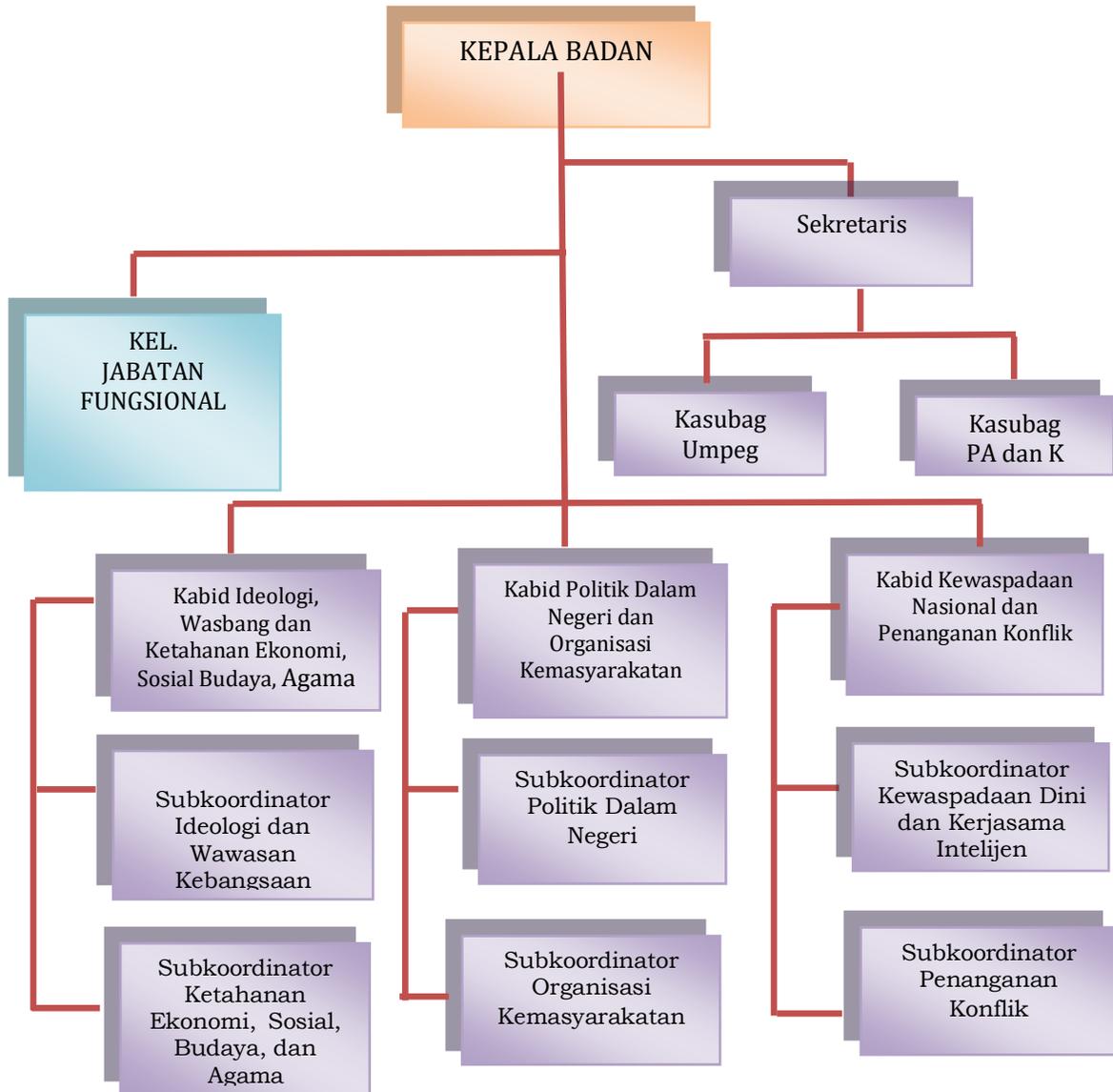
Penyusunan LKjIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Tahun 2022 merupakan kewajiban sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya yang dimiliki. Laporan ini juga menggambarkan perkembangan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka merespon tuntutan kebutuhan penyelenggaraan otonomi daerah, khususnya dalam rangka mewujudkan *Good Government Governance (GGG)*, memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) serta meningkatkan kualitas pelayanan umum. Selanjutnya diharapkan LKjIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 ini dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja serta umpan balik bagi peningkatan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun berikutnya dan dapat dijadikan media untuk membangun kebersamaan berdasarkan kesadaran dan komitmen bersama yang dilandasi sikap kekeluargaan, kejujuran, dan ketulusan untuk berbuat yang terbaik bagi pembangunan Kabupaten Kebumen selanjutnya.

Kelembagaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sesuai dengan Perda Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 yang terdiri dari Kepala Badan yang dibantu oleh satu orang Sekretaris membawahi 2 Kasubbag dan tiga Kepala Bidang serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tatalaksana

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai berikut :

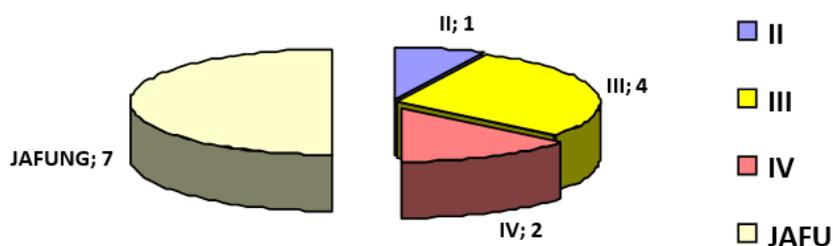


Adapun Jumlah sumberdaya manusia pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk melaksanakan tupoksi sebanyak 22 (duapuluh dua) orang dengan rincian structural, fungsional maupun fungsional umum berdasarkan jenis kepegawaian sebagaimana tercantum dalam diagram dibawah ini :

1. Struktural :

- a. Kepala Badan, eselon II.
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang, eselon III.
- c. Kepala Subbag, eselon IV.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

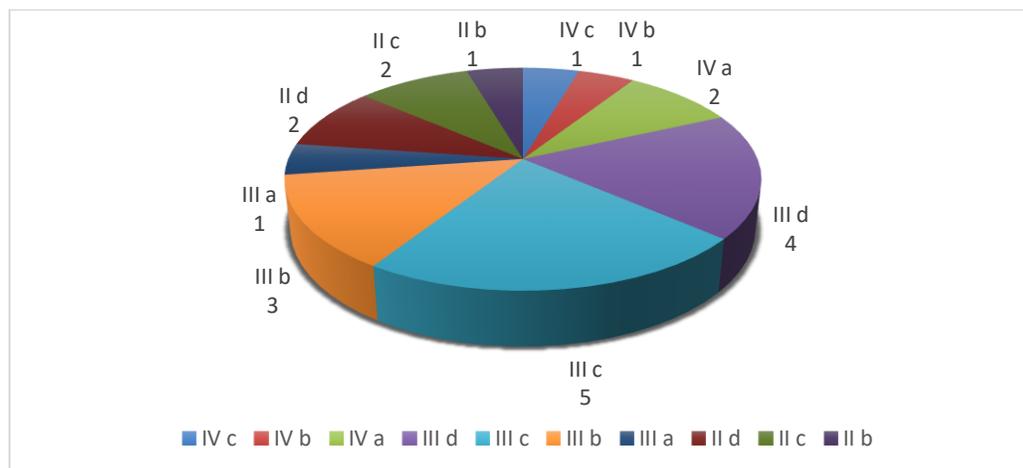
Diagram 1.1.  
Jumlah Pegawai Menurut Eselon / Jabatan



2. Keadaan Pegawai

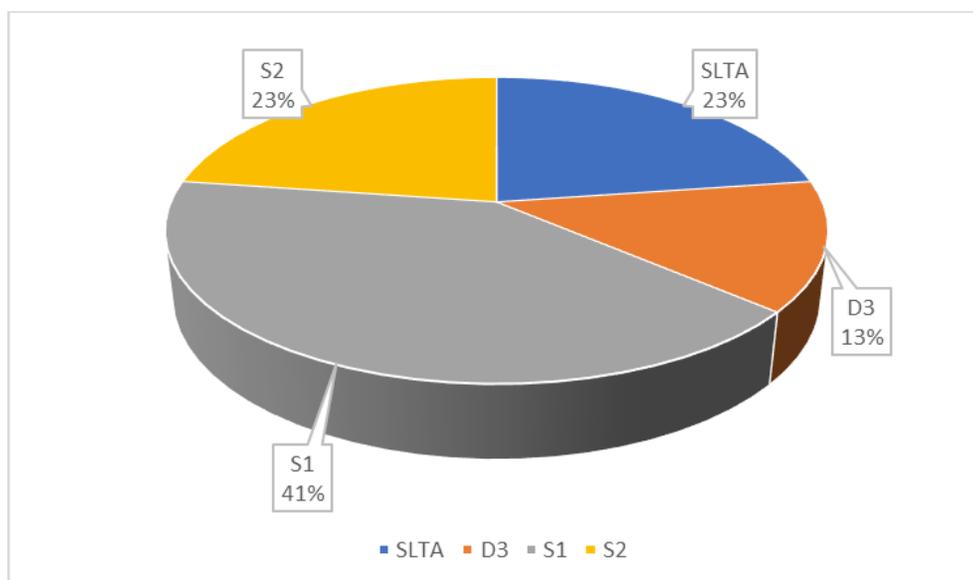
a. Menurut Golongan

Diagram 1.2.  
Jumlah Pegawai Menurut Golongan



b. Menurut Jenjang Pendidikan Terakhir

Diagram 1.3  
Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan



Berdasarkan diagram di atas diketahui bahwa tingkat pendidikan karyawan /karyawati Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada Tahun 2022 masih di dominasi oleh lulusan S1 dan S2 hal ini tentunya memberikan dampak positif dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi . Karena tingkat pendidikan tentunya berpengaruh pada kinerja organisasi.

### 1.2. Fungsi Strategis

Fungsi strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Peraturan Bupati Kebumen Nomor 130 Tahun 2020, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 3 Peraturan Bupati ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program dibidang kesatuan bangsa dan politik;
- b. Perumusan kebijakan dibidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, peminanaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Pelaksanaan koordinasi dibidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi ,pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya peminanaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan monitong, evaluasi dan pelaporan dibidang ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, social dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya, peminanaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik social di wilayah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- f. Pelaksanaan fasilitasi Forum Pimpinan Daerah;
- g. Pelaksanaan administrasi Badan;
- h. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati.

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, maka peranan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sangatlah penting dalam pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan, dimana kegiatannya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam suasana yang aman, nyaman, tentram, kondusif, demokratis dan ikut serta dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.

### 1.3. Permasalahan Utama yang Dihadapi

Permasalahan utama yang dihadapi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dapat dipetakan sebagai berikut :

1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan, Dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama.
  - a. Menurunnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme;
  - b. Menurunnya tingkat toleransi antar umat beragama, yang berpotensi menimbulkan ketidak harmonisan hubungan antar umat beragama/penghayat kepercayaan;
  - c. Masih banyaknya penyalahgunaan narkoba;
  - d. Derasnya arus masuk budaya asing yang kurang sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa dan Pancasila yang berdampak pada adanya dekadensi moral dan budaya di masyarakat.

2. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan.
  - a. Belum optimalnya proses penguatan kualitas dan kapasitas kelembagaan demokrasi;
  - b. Capaian tingkat partisipasi politik masyarakat masih dibawah target nasional;
  - c. Masih terjadinya konflik politik dalam pelaksanaan pemilu
3. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.
  - a. Masih maraknya potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum berupa aksi-aksi unjuk rasa atau demonstrasi;
  - b. Masih munculnya konflik dan kegiatan terorisme atau kekerasan atas nama agama akibat aktualisasi pemahaman keagamaan yang salah;
  - c. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang demokratisasi, penegakan hukum dan HAM yang berpotensi terjadinya konflik dan disintegrasi sosial;
  - d. Adanya kesenjangan ekonomi di daerah, yang bisa menimbulkan kerawanan konflik di masyarakat.

#### 1.4 Sistematika Penyusunan LKjIP

Sistematika penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

##### Bab I. Pendahuluan

Menjelaskan hal-hal umum tentang profil, gambaran umum tupoksi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

##### Bab II. Perencanaan Kinerja.

Menyajikan gambaran singkat mengenai Rencana Strategis dan Rencana Kinerja. Pada bab ini disajikan gambaran secara singkat sasaran yang ingin diraih Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun 2022 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi.

### Bab III. Akuntabilitas Kinerja

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Menyajikan analisa capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen dengan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja;
2. Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Rencana Strategis (Renstra);
4. Analisis (penyebab) keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi pemecahan yang telah dilakukan;
5. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya; dan
6. Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

#### B. Realisasi Anggaran

### Bab IV. Penutup

Kesimpulan atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### 2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

Sesuai tugas pokok dan fungsinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen telah menyusun Rencana Strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2021-2026, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mencakup Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran serta strategipencapaian sasaran yang akan dicapai.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen Tahun 2021-2026 yaitu : “Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Bersama Rakyat.”

Untuk mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan melalui misi-misi sebagai berikut :

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan *e-gov* dan *open-gov* yang terintegrasi.
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan.
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.
6. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen menjalankan misi yang ke-5 yaitu Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

## 2.2. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

Strategi yang ingin dicapai dalam pembangunan guna mewujudkan tujuan misi tersebut antara lain :

- a. Meningkatkan partisipasi politik.
- b. Pemberdayaan Ormas.
- c. Membina dan mengembangkan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya.
- d. Meningkatkan kewaspadaan dini di daerah.

Arah Kebijakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Sebagai berikut :

- a. Menumbuhkan semangat nasionalisme dan mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dalam masyarakat yang multi kultur.
- b. Menumbuhkan kesadaran wawasan kebangsaan.
- c. Pembentukan jiwa patriotisme melalui program bela negara dan pendidikan wawasan kebangsaan.
- d. Penguatan ketahanan ekonomi.
- e. Penguatan fungsi FKUB dan FPBI/FPK.
- f. Penyuluhan Pencegahan, Pemberantasan, Penyalagunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN).
- g. Penguatan Tim Pengawasan Orang Asing dengan instansi terkait dalam menjaga ketentraman dan ketertiban umum.
- h. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Kewaspadaan Dini Daerah melalui FKDM.
- i. Penguatan Tim Penanganan Konflik Sosial.

## 2.3. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan

ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Instansi Pemerintah.

Tabel 2.1.

Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen

No.	Tujuan	Idikator Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Utama
1.	Mewujudkan nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi	Terwujudnya kewaspadaan dini daerah	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal, dan Sumber Daya Ekonomi

BAB III  
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen selaku Organisasi Perangkat Daerah mengemban amanat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja dengan menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja Instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Pengukuran dan analisis pencapaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen mengacu pada sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yang tercantum dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 yang terdiri dari 1 (satu) sasaran.

Tabel 3.1  
Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi  
Pemerintah

No.	Skala Capaian Kinerja	Kategori
1.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
2.	75 – 100%	Baik
3.	55 – 74 %	Cukup
4.	Kurang dari 55 %	Kurang

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen pada tahun anggaran 2022 telah melaksanakan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Gambaran keberhasilan capaian tujuan dan sasaran dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen direpresentasikan oleh capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) seperti tertera pada Tabel 3.2.

Secara umum capaian Indikator Kinerja Utama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang terdiri dari 1 (satu) Indikator Kinerja Utama telah memenuhi target yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2.  
Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
Kabupaten Kebumen

No.	Indikator Sasaran	2021		2022		Target Akhir Renstra	Capaian 2021 terhadap 2022
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %		
1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	57,14	100	60,71	100	78,57	100

#### 1. Capaian Kinerja Sasaran

Capaian Kinerja Sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen yaitu Terwujudnya Kewaspadaan Dini Daerah dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi sebagaimana tabel sebagai berikut :

No	Indikator Sasaran	2021		2022		Target Akhir Renstra	Capaian 2020 terhadap 2021
		Target %	Realisasi %	Target %	Realisasi %		
1	Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	57,14	100	60,71	100	78,57	100

a. Capaian Kinerja Tahun 2022.

Persentase capaian indikator sasaran sampai dengan Desember tahun 2022 sebesar 164% hal ini menunjukkan bahwa capaian indikator sasaran telah melampaui target yang telah ditetapkan atau dengan kategori Sangat Baik. Capaian tersebut diperoleh dari membandingkan target Tahun 2022 sebesar 60,71 dengan realisasi 100%. Dari hasil evaluasi capaian indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi tercapai 100% , dengan demikian capaian kinerja Sasaran telah memenuhi target.

b. Perbandingan Kinerja Tahun Lalu dan Akhir Periode Perencanaan.

Realisasi kinerja tahun 2021 telah tercapai 100%, sedangkan target akhir periode perencanaan yaitu 78,57%. Dari realisasi yang telah dicapai pada tahun 2021 menunjukkan capaian kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan.

c. Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Dari evaluasi kinerja dapat diketahui faktor yang mendukung tercapainya indikator kinerja Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yaitu :

- 1) Telah terbentuknya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan, sehingga setiap permasalahan yang berpotensi menjadi

konflik sosial di masyarakat dapat diantisipasi dan ditangani.

- 2) Dilaksanakannya rapat-rapat koordinasi kewaspadaan dini serta Pusat Komunikasi dan Informasi yang melibatkan berbagai unsur intelejen guna mengumpulkan data-data dan informasi yang berguna untuk melakukan pencegahan dini serta penanganan konflik.
- 3) Sinergitas antar Lembaga dan pihak-pihak terkait dalam upaya pencegahan dan penyelesaian konflik sosial yang berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi yang terjadi di Kabupaten Kebumen.

d. Analisis Efisiensi Sumber Daya

Untuk mencapai kinerja organisasi tahun 2022, telah dilakukan efisiensi sumber daya sebagaimana tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3  
Analisis Efisiensi Sumber Daya

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
1	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	333.247.000	319.250.950	95,80	1,04

NO	Tujuan/ Sasaran	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Capaian	
2	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan	3 kegiatan	3 kegiatan	100	3.562.889.000	3.540.295.444	99,37	0,006
3	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	2 kegiatan	2 kegiatan	100	37.764.000	37.451.200	99,18	0,008
4	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	5 lokasi	59 lokasi	1.180	1.645.941.000	1.615.014.050	98,12	0,916
5	Jumlah Dokumen kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	5 dokumen	5 dokumen	100	212.099.000	207.421.922	97,79	0,022

Dari realisasi anggaran sub kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja ini, dapat diketahui realisasi keuangannya sebagai berikut :

1) Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang

Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta penanganan konflik dengan realisasi anggaran Rp 183.837.722,00 (98,78%).

2) Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah dengan realisasi anggaran Rp 18.550.700,00 (92,75%).

3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan realisasi anggaran Rp 5,033.500,00 (83,89%).

e. Analisis Program Kegiatan Pendukung Kinerja

Program yang mendukung tercapaiannya Indikator Kinerja Utama yaitu :

- 1) Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan.
- 2) Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya.
- 3) Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan.
- 4) Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

B. Realisasi Anggaran

Akuntabilitas keuangan digunakan untuk mengetahui seberapa besar alokasi dan penyerapan anggaran yang dapat

mendukung pencapaian sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen.

Penyerapan anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 dengan jumlah anggaran Rp. 9.182.384.000,00 dengan serapan anggaran sebesar Rp 8.912.534.326,00. Anggaran dan realisasi belanja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2022 tertera pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.  
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan  
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten  
Kebumen Tahun 2022

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.390.444.000	3.193.100.760	94,18
	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15.701.000	15.007.950	95,59
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.038.318.000	2.848.654.014	93,75
	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	30.000.000	29.453.500	98,18
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.609.000	90.932.174	96,11
	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	17.794.000	17.460.000	98,12
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.656.000	83.785.316	98,97

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	109.366.000	107.807.806	98,57
2	PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	333.247.000	319.250.950	95,80
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	333.247.000	319.250.950	95,80
3	PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	3.562.889.000	3.540.295.444	99,37
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	3.562.889.000	3.540.295.444	99,37
4	PROGRAM Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.764.000	37.451.200	99,18

No.	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	37.764.000	37.451.200	99,18
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	1.645.941.000	1.615.014.050	98,12
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	1.645.941.000	1.615.014.050	98,12
6	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	212.099.000	207.421.922	97,79
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	212.099.000	207.421.922	97,79

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen sebagai SKPD yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Untuk dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal maka diperlukan pengelolaan SDM, sumber dana dan sarana secara efisien dan seefektif mungkin.

Tujuan penyusunan laporan LKJIP adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian sasaran sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 menguraikan keberhasilan dan hambatan pelaksanaan misi organisasi. Dari uraian pengukuran kinerja yang diuraikan dalam BAB III, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yaitu :  
Terwujudnya kewaspadaan dini daerah dengan indikator Persentase penanganan konflik berlatar belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi terealisasi 100% dari target 60,71%.
2. Realisasi anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 dari pagu Rp 9.182.384.000,00 terealisasi Rp 8.912.534.326,00 atau 97,06%.

## B. SARAN DAN REKOMENDASI

Keberhasilan kinerja yang telah dicapai tentunya berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak, baik dari internal maupun eksternal organisasi yang selalu memberikan dukungan. Capaian kinerja yang telah sesuai target diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan untuk kedepannya. Target yang belum tercapai telah dilakukan beberapa solusi guna memecahkan permasalahan/hambatan tersebut.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak terkait dan sebagai upaya untuk menyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun 2022 yang dapat kami susun dan laporkan semoga dapat memacu kinerja organisasi untuk lebih baik lagi dan dapat bermanfaat bagi Pemerintah khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Kebumen, 5 Januari 2023

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN KEBUMEN



WIDIATMOKO, S.H.,M.H  
Pembina Utama Muda

NIP. 19681128 199603 1 006